

DESKRIPSI MATA KULIAH

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

No.	Nama Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah (uraian singkat tentang isi mata kuliah)	Jml. SKS
1.	Antropologi Hukum	<p>Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya, yaitu Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya. Antropologi Hukum adalah suatu Bidang Khusus atau suatu spesialisasi dari Antropologi Budaya terutama etnologi atau ilmu bangsa-bangsa. Antropologi Hukum memandang hukum adalah bagian dari suatu kebudayaan dan antropologi budaya itu melakukan pendekatan menyeluruh, menyeluruh artinya terhadap segala hasil daya cipta manusia, maka demikian pula antropologi hukum melakukan pendekatan secara menyeluruh terhadap segala sesuatu yang melatar belakangi budaya hukum tersebut.</p> <p>Antropologi Hukum mempelajari budaya hukum yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum dalam antropologi hukum bukan semata-mata masalah hukum yang normatif sebagaimana yang terdapat dalam hukum perundangan, atau masalah hukum yang merupakan pola perulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, tetapi juga masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum. Objek yang menjadi perhatian di dalam antropologi hukum terutama adalah cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat, khususnya faktor-faktor budaya yang mempengaruhi cara-cara penyelesaian perselisihan di kalangan suku bangsa yang ada di dunia.</p>	2

2.	Ilmu Negara	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang Istilah dan pengertian ilmu Negara, hubungan antara ilmu Negara dengan ilmu lainnya dan defenisi negara kemudian dilanjutkan dengan materi seperti: materi tentang Unsur-unsur Negara, Teori Tentang Asal Mula Negara, Tujuan dan Fungsi Negara, Tipe-tipe Negara, Teori kekuasaan dan legitimasi kekuasaan Negara, Teori Konstitusi, Teori Kedaulatan, Teori Demokrasi, Teori Lembaga Perwakilan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan dan Teori Kerjasama antar Negara. Selanjutnya, penulisan makalah baik individu maupun kelompok. Disamping itu perkuliahan diiringi dengan persentase mahasiswa di depan kelas	3
3.	Pendidikan Agama Islam	Mata kuliah ini mempelajari konsep ketuhanan dalam Islam, keimanan kepada Kholik yang maha pencipta serta ketaqwaan, implementasi iman dan taqwa berdasarkan Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad dalam kehidupan modern, ajaran Islam dan aplikasinya, hakikat manusia menurut Islam, hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, sistem politik Islam, hukum Islam dan kontribusi umat Islam Indonesia, etika, moral dan akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam Islam, kerukunan antarumat beragama, masyarakat madani dan kesejahteraan umat, serta ekonomi Islam.	2
4.	Pendidikan Pancasila	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pendidikan Pancasila. Topik bahasannya meliputi: pengertian, sejarah, Landasan Pend Pancasila, HAM, Demokrasi, Sistem Pemerintahan Indonesia, Filsafat Pancasila, Etika Politik Pancasila, dan Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus	2
5.	Pengantar Hukum Indonesia	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup hukum di Indonesia. Topik bahasannya meliputi: perbedaan dan persamaan PHI dan PIH, sejarah Hukum Indonesia, sumber hukum Indonesia, sistem hukum, dan hukum positif di Indonesia.	3
6.	Pengantar Ilmu Hukum	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan tentang pengertian hukum, perbedaan hukum sebagai ilmu dengan hukum sebagai sistem, unsur hukum, pohon hukum, pembagian disiplin hukum. Setelah itu akan dijelaskan pembagian disiplin hukum ke dalam ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum. Mata kuliah ini hanya fokus membahas tentang ilmu hukum yang terdiri dari ilmu tentang pengertian, ilmu tentang kaedah dan ilmu kenyataan hukum. Dalam ilmu pengertian hukum akan dibahas subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban, akibat hukum dan hubungan hukum. Dalam materi ilmu kaedah akan dibahas macam-macam kaedah, tujuan kaedah, sifat kaedah, tugas kaedah dan penyimpangan kaedah hukum. Dalam ilmu kenyataan hukum akan dibahas sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum keberlakuan hukum dalam masyarakat, hubungan antara peraturan hukum konkret – kaidah – asas-asas (legal principles), sumber-sumber hukum, sistem hukum, klasifikasi hukum, penerapan dan penegakan hukum, penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), serta hubungan hukum dan kekuasaan.	3

7.	Sosiologi Hukum	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang perspektif tentang sosiologi hukum, mashab-mashab dalam sosiologi hukum, hukum dan masyarakat, dinamika hukum dalam masyarakat judicial activism	2
8.	Terminologi Hukum	Mata kuliah ini mempelajari suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian sebenarnya.	2
9.	Bahasa Indonesia	Hakikat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, Teks akademik dalam genre makro, menjelajah dunia pustaka, mendesain proposal penelitian dan hasil kegiatan, dan mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah	2
10.	Hukum Administrasi Negara	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Topik bahasannya meliputi: identitas nasional, hak dan kewajiban WNI, negara dan konstitusi, demokrasi, hukum, HAM, pendidikan anti korupsi, wawasan nusantara, otonomi daerah, ketahanan nasional dan politik strategi nasional	3
11.	Hukum Ekonomi	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang pengantar hukum bisnis, hukum perusahaan, perusahaan Negara, hukum kontrak, lembaga pembiayaan, hukum perburuhan, perlindungan konsumen, hukum perbankan, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, HAKI, dan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Di samping itu, perkuliahan dilanjutkan tentang penalaran dan presentasi ilmiah	2
12.	Hukum Internasional	Dalam Mata kuliah hukum internasional ini diberikan topik-topik tentang teori-teori dan dasar-dasar serta prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat publik secara umum. Pendekatan yang digunakan ialah dengan mengadakan analisa pada sendi-sendi hukum internasional yang bersifat publik dan setiap cabang dari hukum internasional secara umum. Dengan demikian mahasiswa akan mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum internasional publik. Untuk hal itu maka juga diperlukan pembahasan terhadap sejarah hukum internasional publik sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang. Mata kuliah ini juga membahas tentang subjek-subjek hukum internasional seperti negara dan subjek hukum internasional lainnya, dan membahas bagaimana hubungan antara hukum internasional publik ini dengan hukum nasional yang berlaku di suatu negara serta sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman dalam memecahkan permasalahan yang muncul didalam hubungan antara negara. Dibahas dan dianalisis pula kedudukan negara sebagai aktor utama dalam pergaulan internasional khususnya yang berkaitan masalah hukum yang difokuskan kepada pembahasan pengakuan negara, kedaulatan negara dan yurisdiksi negara. Hubungan antar negara serta subjek hukum internasional lainnya, mengakibatkan munculnya tanggung jawab negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional, dimana tanggung	3

		jawab negara ini muncul juga disebabkan oleh persoalan internal negara yang mengakibatkan terjadi suksesi negara maupun suksesi pemerintahan. Hubungan antar negara adalaknya menciptakan suatu sengketa baik sengketa politik maupun sengketa hukum. Hukum internasional memfokuskan diri pada penyelesaian sengketa internasional secara hukum, dengan berbagai mekanisme dan cara yang telah menjadi praktek dalam dunia internasional	
13.	Hukum Islam	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Matakuliah Hukum Islam membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari Hukum Islam: Pengertian Islam, karakteristik Hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, tujuan pokok syariat Islam, sumber-sumber hukum Islam, Hukum Islam dan moralitas, hukum perdata Islam, hukum pidana Islam, makanan dan minuman menurut hukum Islam, konsep dan hakikat Jihad dalam Islam, konsep Islam bernegara dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia	3
14.	Hukum Perdata	Mata kuliah hukum perdata menekankan pada pemahaman aspek hukum perdata dan turunannya berdasarkan pembagiannya berupa hukum tentang orang, benda, perikatan dan pembuktian dan daluwarsa.	3
15.	Hukum Pidana	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan tentang dasar-dasar ilmu Hukum Pidana, Ketentuan-ketentuan Umum, Asas-asas dan pengertian-pengertian pokok hukum pidana.	3
16.	Hukum Tata Negara	Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian, pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 melalui pendekatan teoretis, historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis, pengertian ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, hakikat hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, teori konstitusi, perkembangan UUD 1945, konsepsi negara hukum dan demokrasi, sistem pemerintahan (sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945), lembaga-lembaga negara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilu di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi.	3
17.	Pendidikan Kewarganegaraan	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Topik bahasannya meliputi: identitas nasional, hak dan kewajiban WNI, negara dan konstitusi, demokrasi, hukum, HAM, pendidikan anti korupsi, wawasan nusantara, otonomi daerah, ketahanan nasional dan politik strategi nasional	2
18.	Delik Delik KUHP	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan tentang sistematika KUHP serta unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP.	2
19.	Hukum Acara Peradilan Agama	Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semeseter III, yang materinya meliputi, Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadiliperkara-perkara perdata dimana parapihaknya beragama Islam(muslim). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)UndangundangNomor 7 Tahun	2

		1989 tentang Peradilan Agama(UUPA), peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dll. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 UUPA). Pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUPA).	
20.	Hukum Acara Perdata	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Hukum Acara Perdata. Topik bahasannya meliputi: pengertian, sejarah, sumber hukum acara perdata, kompetensi pengadilan, perdamaian, Cara mengajukan gugatan, perubahan, pencabutan, penggabungan gugatan, Pembuktian, Sita dan Penyitaan dalam Gugatan Perdata, Putusan, banding, kasasi, PK, eksekusi dan lelang.	3
21.	Hukum Acara Pidana	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian, ruang lingkup, sumber-sumber hukum acara pidana, tujuan, sejarah, tugas dan wewenang aparat, penegak hukum dalam proses peradilan pidana, pengertian penyelidikan dan penyidikan pengertian dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (upaya paksa), pengertian tersangka dan terdakwa pengertian praperadilan dan koneksi, surat dakwaan, proses pemeriksaan di depan persidangan, macam-macam pemeriksaan di pengadilan negeri, upaya hukum dalam proses peradilan pidana serta tugas hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana.	3
22.	Hukum Acara PTUN	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Mata kuliah Hukum Acara PTUN bertujuan untuk menambah keilmuan mahasiswa dalam aspek teoritis beracara di Pengadilan TUN. Mata kuliah ini membahas tentang: Pengertian Hukum Acara PTUN, Karakteristik hukum acara PTUN Asas-asas/prinsip hukum acara PTUN, Kompetensi PTUN, Para pihak Penggugat Tergugat, Perkembangan Hukum Acara PTUN, Gugatan, Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN, Penetapan penundaan KTUN, Pemeriksaan administratif, Pemeriksaan persiapan, Pemeriksaan acara biasa, Pemeriksaan acara singkat dan cepat, Pembuktian, Putusan, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan PTUN.	3
23.	Hukum Agraria	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Mata Kuliah Hukum Agraria bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang sejarah berlakunya hukum tanah sebelum berlakunya UUPA, asas-asas dalam UUPA, hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan sementara, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga jaminan tanah, pengadaan tanah, land use (tata guna tanah), landreform dewasa ini, konsolidasi tanah dan konversi hak atas tanah.	3

		Kegiatan kuliah ini dengan penyampaian materi dan pemberian latihan serta tugas untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan Hukum Agraria	
24.	Hukum Dagang	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup hukum dagang yang meliputi konsep-konsep hukum dagang, usaha perniagaan dan <i>goodwill</i> bursa perdagangan, persaingan melawan hukum, perlindungan konsumen, hukum perusahaan, pembukuan, jual beli perusahaan, HAKI, lembaga pembiayaan dan kepailitan	2
25.	Hukum Laut dan Perikanan	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang definisi Hukum Laut dan Perikanan, persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan, zona-zona laut beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada zona tersebut serta bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan	2
26.	Hukum Lingkungan	Mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum lingkungan yang meliputi latar belakang lahirnya disiplin ilmu hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, lahirnya kesadaran lingkungan hidup di tingkat global dan Indonesia, dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum lingkungan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemma dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan, konservasi SDA hayati, penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana serta menelaah dan menganalisa berbagai kasus di bidang lingkungan hidup.	2
27.	Hakk Atas Kekayaan Intelektual	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian, Landasan Hukum, Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, perbedaan masing- masing jenis, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.	2
28.	Hukum Adat	Mata kuliah hukum adat menekankan pada sisi sosiologis antropologis masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebiasaan menjadi sebuah aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat. Materi kajian hukum adat berupa pengertian hukum adat, unsur-unsur hukum adat, bentuk dan pembedannya, sejarah perkembangan hukum adat, landasan berlakunya hukum adat, persekutuan dan lingkungan hukum adat, hukum tanah adat, waris adat, dan delik adat.	2
29.	Hukum Adat melayu Riau	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari Hukum Adat Melayu Riau, Pengertian, Istilah Budaya, Adat , Hukum Adat, hukum Adat Melayu Riau, Sumber, Sejarah, Corak, Pembedangan, Hukum Adat Melayu Riau, Hukum Perseorangan, Hukum Kekeluargaan, Persekutuan Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Hukum Harta Benda Perkawinan, Hukum	2

		Pewarisan Adat, Hukum Tanah, Hukum Benda, Hukum Piutang dan Perjanjian Adat dan Delik-delik Adat pada masyarakat Melayu Riau.	
30.	Hukum Kesehatan	Mata kuliah ini membahas tentang Konsep Dasar Hukum Kesehatan, Pengertian, Sejarah Hukum Kesehatan, Fungsi Hukum Kesehatan, Ruang Lingkup, Sumber Hukum Kesehatan, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Aspek Hukum Tindakan Medik atau Non Medik, Perjanjian Terapeutik, Hukum dan Etika Kedokteran, Standar Profesi Medis dan Audit Medis, Malpraktek Medik atau Non Medik, Penyelesaian Hukum Malpraktek Kedokteran, Akibat Hukum Kesalahan dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum.	2
31.	Hukum Perdata Internasional	Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang kedudukan perdata internasional dalam pergaulan masyarakat internasional. Materi kajian hukum perdata internasional berupa pengertian hukum perdata internasional, status personal manusia, status personal badan hukum, dan peristiwa keperdataan yang terdapat unsur asing didalamnya.	2
32.	Hukum Perikatan	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Mata Kuliah Hukum Perikatan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang perbedaan antara perikatan dengan perjanjian, ruang lingkup perikatan dan perjanjian, jenis-jenis perikatan dan perjanjian, pengertian dan akibat wanprestasi, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, cara-cara hapus atau berakhirnya perikatan dan perjanjian, serta menjelaskan tentang perikatan yang lahir dari undang-undang. Kegiatan kuliah ini dengan penyampaian materi dan pemberian latihan serta tugas untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan Hukum Perikatan.	2
33.	Hukum Perusahaan	Hakikat, kedudukan dan fungsi perusahaan, dasar hukum perusahaan dan perkembangan hukum perusahaan, pembagian jenis-jenis perusahaan berikut organ, modal, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pendirian badan hukum dan pembubaran.	2
34.	Hukum Pidana Khusus	Hukum Pidana Khusus membahas pengertian, dasar hukum dan kekhususan hukum pidana khusus, ruang lingkup pidana khusus, dan hukum acara tindak pidana khusus.	2
35	Ilmu Perundang-Undangan	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Matakuliah Ilmu Perundang-undangan bertujuan untuk menambah keilmuan mahasiswa dalam aspek teoritis pembentukan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini membahas tentang: Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Norma Hukum dan Tata Susunannya, Landasan dan Asas-Asas Hukum dalam Peraturan Perundang- Undangan, Jenis, Hirarki dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kerangka dan Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pengundangan, Daya Ikat dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan,	2

		Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Latihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan kuliah ini dengan diskusi, informasi dan latihan serta tugas pada setiap kali tatap muka untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan Ilmu Perundang-undangan.	
36	Kriminologi	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian kriminologi, kejahatan dan penjahat, tujuan dan manfaat kriminologi, objek studi kriminologi serta ilmu bantu dalam kriminologi. Selanjutnya pembahasan tentang sejarah perkembangan studi kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, mazhab-mazhab/aliran-aliran dalam kriminologi, teori-teori dalam kriminologi, tahapan-tahapan penanggulangan kejahatan. Di samping itu, perkuliahan dilanjutkan tentang kejahatan <i>money laundering</i> dan prostitusi dalam perspektif kriminologi, kenakalan remaja serta kejahatan kekerasan dan brutalisme massa dalam perspektif kriminologi.	2
37	Metode Penelitian dan Penulisan	Mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum berfungsi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas akhirnya dalam bentuk penyusunan skripsi. Skripsi dapat disusun hanya melalui penelitian, dan penulisannya mengikuti aturan penulisan hukum yang ditetapkan oleh fakultas. Materi mata kuliah dibagi dalam dua bagian yaitu : 1). Metode Penelitian Hukum dan 2) Metode Penulisan Hukum. Metode Penelitian Hukum secara umum meliputi pengertian penelitian sebagai kegiatan ilmiah beserta langkah-langkah sistematis yang harus dilalui, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penulisan laporan penelitian. Secara khusus pemahaman terhadap materi kuliah ini dikaitkan dengan tipe-tipe atau jenis penelitian hukum yang dibedakan dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Mengenai Metode Penulisan Hukum yang tiada lain adalah juga merupakan bagian akhir dari kegiatan penelitian diarahkan kepada metode penulisan Skripsi seperti yang sudah dimuat dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Riau.	3
38.	Bantuan Hukum	Mempelajari dasar-dasar tentang bantuan hukum, meliputi; pengertian, sejarah, latar belakang timbulnya kebutuhan akan bantuan hukum, jenis-jenis dan fungsi bantuan hukum serta tujuannya. Beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, hubungan hukum dengan HAM. Penasehat hukum dan organisasi pemberian bantuan hukum, bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak (kurang) mampu dan bantuan hukum dalam undang-undang tentang bantuan hukum serta bantuan hukum di Indonesia pada masa yang akan datang, meliputi; bantuan hukum struktural, strategi pengembangan program bantuan hukum di Indonesia dan peranan pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum terhadap bantuan hukum dan perannya dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM.	2

39	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari Hukum Anti Monopoli, Pengertian, Landasan Hukum, Perkembangan Hukum Anti Monopoli di Indonesia, Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Perjanjian, kegiatan dan hal-hal yang dilarang dalam UU Monopoli, Hal-hal yang di kecualikan dalam UU Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Prosedur Pemeriksaan Perkara di KPPU.	2
40	Hukum Asuransi	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup Hukum Asuransi, pengertian pokok dan asas dalam perjanjian asuransi dan hal yang berkaitan dengan produk asuransi. Prospek hukum asuransi di Indonesia semakin signifikan, terutama yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan dalam aktivitas, seperti hilangnya nyawa seseorang, suatu hal yang menyangkut harta kekayaan seseorang, untuk itu perlu adanya satu pertanggungan jiwa dan harta kekayaan. Hukum asuransi akan memberikan pertanggungan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami hukum asuransi dalam teori dan prakteknya di dunia perasuransian Indonesia	2
41	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Landasan Teoritis dan Konsep Keadilan Dalam Negara Hukum, Konsep Dasar HAM, Perkembangan Pemikiran HAM, Instrumen-Instrumen Internasional HAM, HAM Dalam Hukum Nasional, Mekanisme Penegakan HAM Nasional, Pengadilan HAM Indonesia, Hak Perempuan, Hak Anak, Hak Penyandang Cacat, Kebebasan Pers, Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2
42	Hukum Kepailitan	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan pentingnya mempelajari Hukum Kepailitan, Sejarah dan Perkembangan Hukum Kepailitan, Filosofi Hukum Kepailitan, Dasar Hukum Kepailitan, Syarat dan Prosedur pailit, Akibat Putusan Pailit, Actio Pauliana, Klasifikasi Kreditor, Perdamaian (Acord), Rapat Verifikasi, Kurator, Hakim Pengawas, Fase Insolvensi, Pengurusan dan Pembersihan Boedel Pailit, Berakhirnya Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Prosedur dan akibat PKPU, Reorganisasi Perusahaan.	2
43	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa Program Kekhususan HTN Fakultas Hukum Universitas Riau. Matakuliah Hukum Lembaga-Lembaga Negara bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep, teori-teori lembaga-lembaga negara, perkembangan dan macam-macamnya berikut struktur kelembagaannya dalam konstitusi yang pernah maupun yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang: definisi dan konsepsi lembaga negara; lembaga negara dalam konstitusi yang pernah dan yang berlaku di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Kepresidenan,	2

		Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatan kuliah ini dengan diskusi informasi dan latihan serta tugas pada setiap kali tatap muka untuk menjelaskan, menguraikan serta memecahkan persoalan yang berhubungan dengan Hukum Lembaga-Lembaga Negara.	
44	Hukum Pajak	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Matakuliah Hukum Pajak bertujuan untuk menambah keilmuan mahasiswa dalam aspek teoritis aspek-aspek yang berkaitan dengan perpajakan mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur peristiwa dan tindakan yang menimbulkan penggunaan pajak oleh negara. Mata kuliah ini membahas tentang: definisi pajak dan hukum pajak, alasan pemungutan pajak, Teori dan asas pemungutan pajak serta fungsi pajak, Subyek dan obyek pajak serta ketentuan umum mekanisme perpajakan, Perbedaan dan pembagian hukum serta kedudukan hukum pajak bagi pembiayaan Negara, tarif-tarif pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sistem pemungutan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) penegakan hukum di bidang perpajakan dan mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan.	2
45	Hukum Panitensier		2
46	Hukum Perbankan	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Topik bahasannya meliputi: pengertian, sejarah, sumber hukum perbankan, jenis bank, bidang usaha bank, rahasia bank, dewan moneter, lembaga Penjamin simpanan dan tindak pidana perbankan.	2
47	Hukum perburuhan dan tenaga kerja	Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja dan pekerja, prapelaksanaan dan pascahubungan kerja, politik hukum ketenagakerjaan, aspek hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum ekonomi, hukum internasional, perlindungan hukum yang merupakan hak pekerja, termasuk pekerja yang bekerja di luar negeri (TKI), antara lain: tentang upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	2
48	Hukum Perlindungan Konsumen	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari mata kuliah , pengertian, sejarah, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha, asas, prinsip dasar perlindungan konsumen, kontrak baku, isu penting dalam perlindungan konsumen, aspek hukum dalam perlindungan konsumen, lembaga lembaga dalam perlindungann konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen.	2
49	Penyelesaian Senketa Internasional	Sengketa-sengketa internasional (International Disputes) bukan saja mencakup sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan	2

		internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu, antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara dipihak lain. Dalam mata kuliah ini ruang lingkup hukum sengketa internasional dibatasi hanya membahas sengketa antara negara dengan negara. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional merupakan mata kuliah kelanjutan dari Hukum Publik Internasional. Didalam kuliah ini disajikan topik-topik dan teori-teori yang berkenaan dengan Pengertian dan Batasan Sengketa Internasional, pembedaan sengketa politik dan sengketa hukum serta penyelesaian sengketa internasional tersebut secara damai maupun dengan kekerasan atau secara paksa. Dibahas juga cara- cara penyelesaian sengketa tersebut menurut instrumen-instrumen hukum internasional dan praktik-praktiknya oleh negara-negara, oleh organisasi internasional dan oleh lembaga-lembaga peradilan internasional, baik dalam ruang lingkup global maupun regional.	
50	Hukum Lembaga Pembiayaan	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari mata kuliah , pengertian, sejarah, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha, asas, prinsip dasar perlindungan konsumen, kontrak baku, isu penting dalam perlindungan konsumen, aspek hukum dalam perlindungan konsumen, lembaga lembaga dalam perlingduangann konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen.	2
51	Hukum Pasar Modal	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan pentingnya mempelajari Hukum Pasar Modal, Pengertian Pasar Modal dan Dasar Hukum Pasar Modal, Fungsi Pasar Modal, proses go publik, Penawaran Umum (IPO), Pihak-pihak Yang Terkait di Pasar Modal, transaksi efek di Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan, Perlindungan Terhadap Investor di Pasar Modal, <u>Kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal, Insider Trading</u>	2
52	Hukum Penanaman Modal	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari Hukum Penanaman Modal, Pengertian, Landasan Hukum, Perkembangan Hukum Penanaman Modal, Asas, Tujuan dan Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Penanaman Modal, Pengembangan Penanaman Modal, Tatacara Penanaman Modal, Perizinan, Kebijakan Penanaman Modal, Sanksi dan Penyelesaian Sengketa.	2
53	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Mata kuliah ini membahas tentang prinsip, kebijakan dan pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan, para pihak yang terkait pengadaan, organisasi pengadaan, hubungan kerja dan pelanggaran yang dapat terjadi dalam pengadaan, serta proses terjadinya pengadaan sejak perencanaan, persiapan, perjanjian, pelaksanaan, monitoring, dan serah terima.	2
54	Peranc. Peraturan Per UU	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan HTN/HAN Universitas Riau. Matakuliah Perancangan Peraturan Perundang-	2

		undangan bertujuan untuk melatih keahlian mahasiswa dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini membahas tentang: pengantar perancangan peraturan perundang-undangan; naskah akademik peraturan perundang-undangan; kerangka peraturan perundang-undangan; pendelegasian kewenangan dan penyidikan; ragam bahasa peraturan perundang-undangan; perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan; bentuk peraturan perundang-undangan; pengujian peraturan perundang-undangan; serta latihan penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan kuliah ini dengan diskusi informasi dan latihan serta tugas pada setiap kali tatap muka untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan.	
55	Perancangan Kontrak	Substansi mata kuliah Perancangan Kontrak mencakup aspek-aspek praktis dalam merancang kontrak yang meliputi pengertian, sumber hukum, tujuan perancangan kontrak, pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, macam-macam kontrak, pengertian akta, peraturan tentang akta, macam-macam akta, pejabat pembuat akta, kekuatan mengikat akta, pengertian <i>mou</i> , pengaturan dan macam <i>mou</i> , tujuan dan kekuatan mengikat <i>mou</i> , prinsip dan faktor dalam perancangan kontrak, tahap-tahap perancangan kontrak, struktur dan anatomi kontrak. Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum yang mengacu pada konsep pembentukan hukum, di samping mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka substansi perkuliahan Perancangan Kontrak juga mencakup pembahasan tentang teori dan analisa kasus berdasarkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda (baik dari tradisi sistem hukum Eropa Kontinental maupun berdasarkan tradisi sistem hukum Anglo Saxon).	2
56	Praktik Peradilan Perdata	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan memberikan dasar bagi mahasiswa untuk mempraktekkan hukum perdata dalam lalu lintas hukum di Pengadilan, praktek perdilan perdata berhubungan dengan kontrak-kontrak, kemahiran dan berpraktek beracara di pengadilan, baik di peradilan umum dan peradilan agama hal ini sangat berguna sekali dalam rangka penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum masyarakat.	3
57	Praktik Peradilan Pidana	Mata kuliah ini membahas Penyelesaian Pekara Pidana, Mempraktekan Membuat Surat, Teknis membuat dan menyusun surat-surat dalam persidangan Acara Pemeriksaan Biasa, Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.	3
58	Praktik Peradilan TUN	Mata kuliah ini membahas tentang esensi dari hukum yang menjelaskan hakikat dari hukum, menguraikan tentang sejarah filsafat hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, kekuasaan dan hukum, teori-teori tentang kontrak sosial, serta menjelaskan keadilan yang bagian dari filsafat hukum	3

59	Etika Profesi Hukum	Etika Dan Moral, Etika Cabang Ilmu Fisafat, Peranan Etika, Tema-Tema Etika, Manusia Yang Baik, Dan Etika Dalam Profesi Hukum	2
60	Filsafat Hukum	Mata kuliah ini membahas tentang esensi dari hukum yang menjelaskan hakikat dari hukum, menguraikan tentang sejarah filsafat hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, kekuasaan dan hukum, teori-teori tentang kontrak sosial, serta menjelaskan keadilan yang bagian dari filsafat hukum	2
61	KKN	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Matakuliah Hukum Pajak bertujuan untuk menambah keilmuan mahasiswa dalam aspek teoritis aspek-aspek yang berkaitan dengan perpajakan mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur peristiwa dan tindakan yang menimbulkan penggunaan pajak oleh negara. Mata kuliah ini membahas tentang: definisi pajak dan hukum pajak, alasan pemungutan pajak, Teori dan asas pemungutan pajak serta fungsi pajak, Subyek dan obyek pajak serta ketentuan umum mekanisme perpajakan, Perbedaan dan pembagian hukum serta kedudukan hukum pajak bagi pembiayaan Negara, tarif-tarif pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sistem pemungutan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) penegakan hukum di bidang perpajakan dan mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan.	2

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Dekan

Pekanbaru,

Dr. Mexsasai Indra

NIP 198103132008011010

